



GUBERNUR PAPUA
PEKATUAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DEGAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA

1. bahwa perubahan dengan perimbangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan tahun APBD, kondisi yang mengakibatkan tergesernya antar varis organisasi, antara kegiatan dan arus jalin belanj, keadaan yang menyababkan ada lebih lanjut anggaran : pelaksanaan bant digantikan untuk penimbangan dalam tahun anggaran 2015 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten/Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hasil Asli Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hasil Asli Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kebutuhan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Protokolier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Protokolier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dasar Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengalokasian Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengalokasian Anggaran MDA Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pelembagaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Minalisasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 159);
- 26. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dalam Penyelenggaraan Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tanggung Jawab Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220);

- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4/988 Tahun 2015 tentang Hasil Evaluasi Rencanan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Perawatun Gubernur Papua tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
- 34. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAK PERSWAKILAK BAKYAT PAPUA

dan
GUBERNUR PAPUA
MEMUTUSKAN :

Mengucapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp11.357.406.827.000,00 berubah menjadi Rp13.208.460.396.794,00 sehingga mencapai Rp13.987.595.808.486,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp11.357.406.827.000,00
a. Bea cukai	Rp 630.168.981.453,00
b. Retribusi	Rp11.987.595.808.455,00
2. Belanja Daerah	Rp11.935.508.825.500,00
a. Belanja	Rp 1.232.951.531.204,00
b. Bantuan	Rp13.208.460.396.794,00
3. Hibah	Rp 1.290.804.548.249,00
3. Pembayaran	

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Sernula Rp45.225.000.000,00
 2) Bertimbang (Rp23.326.321.828,00)
 Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp15.898.578.172,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Sernula Rp122.590.000.000,00
 2) Bertimbang Rp. 24.008.183.283,00
 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp147.288.183.283,00
 setelah Perubahan

f. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil/bagi hasil bulanan pajak

1) Sernula Rp640.006.840.000,00
 2) Bertimbang Rp. 78.987.250.000,00
 Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp718.994.120.000,00

b. Dana alokasi umum

1) Sernula Rp2.277.932.698.000,00
 2) Bertimbang/ (Bertimbang) Rp. 0,00
 Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp2.277.932.698.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Sernula Rp165.303.520.000,00
 2) Bertimbang Rp295.000.000.000,00
 Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp460.303.520.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Sernula Rp. 0,00
 2) Bertimbang Rp.490.000.000,00
 Jumlah pendapatan hibah Rp.490.000.000,00

b. Dana penyertaan

1) Sernula Rp457.146.400.000,00
 2) Bertimbang/ (Bertimbang) Rp. 0,00
 Jumlah Dana penyertaan setelah Perubahan Rp457.146.400.000,00

c. Dana otonomi khusus

1) Sernula Rp4.940.429.880.000,00
 2) Bertimbang Rp. 0,00
 Jumlah Dana otonomi khusus Rp4.940.429.880.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Sernula Rp2.000.000.000.000,00
 2) Bertimbang Rp. 250.000.000.000,00
 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp2.250.000.000.000,00

g. Jumlah dana tambahan infrastruktur setelah Perubahan

1) Sernula Rp28.101.998.500,00
 2) Bertimbang Rp277.532.899.749,00
 Jumlah pendapatan setelah Perubahan Rp1.305.894.548.249,00

2) Bertimbang Rp50.000.000,00
 3) Bertimbang Rp205.000.000.000,00
 Jumlah pengalangan setelah Perubahan Rp255.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.281.894.548.249,00

2) Sernula Rp. 0,00
 3) Bertimbang Rp. 0,00
 Jumlah pendapatan anggaran setelah perubahan

Paragraf 2

2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli Daerah

1) Sernula Rp475.387.489.000,00
 2) Bertimbang Rp. 5.711.303.455,00
 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp481.098.792.455,00

b. Dana Perimbangan

1) Sernula Rp3.083.243.058.000,00
 2) Bertimbang Rp. 373.387.280.000,00
 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp3.457.330.338.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Sernula Rp7.397.576.280.000,00
 2) Bertimbang/ (Bertimbang) Rp. 250.490.000.000,00
 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp7.648.066.280.000,00

2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Pajak daerah

1) Sernula Rp441.889.000,00
 2) Bertimbang Rp. 10.000.000.000,00
 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp451.889.000,00

b. Lain-lain pendapatan daerah

1) Sernula Rp59.333.500.000,00
 2) Bertimbang Rp. 335.940.000,00
 Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah Perubahan Rp59.670.440.000,00

g. Hasil

20) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis-jenis:

- a. Belanja program
 - 1) Semula Rp202.291.522.000,00
 - 2) Bertambah Rp 12.328.030.000,00
 - Jumlah belanja program setelah Perubahan Rp214.619.552.000,00
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp2.119.811.413.846,00
 - 2) Bertambah Rp 609.948.287.412,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp2.729.759.701.258,00
- c. Bantuan modal
 - 1) Semula Rp2.793.287.805.982,00
 - 2) Bertambah Rp 275.474.745.780,00
 - Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp3.068.762.551.762,00

Paragraf 4

21) Pengeluaran Diarahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

- a. Perencanaan
 - 1) Semula Rp428.101.998.500,00
 - 2) Bertambah Rp677.762.549.749,00
 - Jumlah perencanaan setelah Perubahan Rp1.105.864.548.249
- b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp50.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp25.000.000.000,00
 - Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp75.000.000.000,00

22) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis-jenis:

- a. SLPA tahun anggaran sebelumnya
 - 1) Semula Rp378.101.998.500,00
 - 2) Bertambah Rp677.762.549.749,00
 - Jumlah SLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp1.055.864.548.249
- b. Perencanaan dalam anggaran
 - 1) Semula Rp250.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah perencanaan dalam anggaran setelah Perubahan Rp250.000.000.000,00

23) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Perencanaan modal pada PT Bank Papua
 - 1) Semula Rp25.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp25.000.000.000,00
 - Jumlah perencanaan modal setelah Perubahan Rp50.000.000.000,00
- b. Perencanaan modal pada Lembaga Perjamatan
 - 1) Semula Rp25.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah perencanaan modal setelah Perubahan Rp25.000.000.000,00

24) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp6.820.148.083.072,00
 - 2) Bertambah Rp 335.200.458.012,00
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp7.155.348.541.084,00
- b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp5.115.360.741.928,00
 - 2) Bertambah Rp 997.751.073.192,00
 - Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp6.113.111.815.020,00

25) Belanja Diarahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp944.428.245.150,00
 - 2) Bertambah Rp 62.200.358.080,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp1.006.628.603.230,00
- b. Belanja tidak
 - 1) Semula Rp866.922.339.100,00
 - 2) Bertambah Rp 18.094.626.550,00
 - Jumlah belanja tidak setelah Perubahan Rp885.016.965.650,00
- c. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp105.034.311.022,00
 - 2) Bertambah Rp 5.000.000.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp110.034.311.022,00
- d. Belanja hasil
 - 1) Semula Rp295.885.918.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.581.278.982,00
 - Jumlah belanja hasil setelah Perubahan Rp297.467.196.982,00
- e. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp4.577.877.270.400,00
 - 2) Bertambah Rp 265.323.994.400,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp4.843.201.264.800,00
- f. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp30.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 7.000.000.000,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp37.000.000.000,00

Paragraf 3

Belanja Diarahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp6.820.148.083.072,00
 - 2) Bertambah Rp 335.200.458.012,00
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp7.155.348.541.084,00
- b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp5.115.360.741.928,00
 - 2) Bertambah Rp 997.751.073.192,00
 - Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp6.113.111.815.020,00

Belanja Diarahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp944.428.245.150,00
 - 2) Bertambah Rp 62.200.358.080,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp1.006.628.603.230,00
- b. Belanja tidak
 - 1) Semula Rp866.922.339.100,00
 - 2) Bertambah Rp 18.094.626.550,00
 - Jumlah belanja tidak setelah Perubahan Rp885.016.965.650,00
- c. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp105.034.311.022,00
 - 2) Bertambah Rp 5.000.000.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp110.034.311.022,00
- d. Belanja hasil
 - 1) Semula Rp295.885.918.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.581.278.982,00
 - Jumlah belanja hasil setelah Perubahan Rp297.467.196.982,00
- e. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp4.577.877.270.400,00
 - 2) Bertambah Rp 265.323.994.400,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp4.843.201.264.800,00
- f. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp30.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 7.000.000.000,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp37.000.000.000,00

Belanja Diarahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp944.428.245.150,00
 - 2) Bertambah Rp 62.200.358.080,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp1.006.628.603.230,00
- b. Belanja tidak
 - 1) Semula Rp866.922.339.100,00
 - 2) Bertambah Rp 18.094.626.550,00
 - Jumlah belanja tidak setelah Perubahan Rp885.016.965.650,00
- c. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp105.034.311.022,00
 - 2) Bertambah Rp 5.000.000.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp110.034.311.022,00
- d. Belanja hasil
 - 1) Semula Rp295.885.918.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.581.278.982,00
 - Jumlah belanja hasil setelah Perubahan Rp297.467.196.982,00
- e. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp4.577.877.270.400,00
 - 2) Bertambah Rp 265.323.994.400,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp4.843.201.264.800,00
- f. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp30.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 7.000.000.000,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp37.000.000.000,00

Belanja Diarahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp944.428.245.150,00
 - 2) Bertambah Rp 62.200.358.080,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp1.006.628.603.230,00
- b. Belanja tidak
 - 1) Semula Rp866.922.339.100,00
 - 2) Bertambah Rp 18.094.626.550,00
 - Jumlah belanja tidak setelah Perubahan Rp885.016.965.650,00
- c. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp105.034.311.022,00
 - 2) Bertambah Rp 5.000.000.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp110.034.311.022,00
- d. Belanja hasil
 - 1) Semula Rp295.885.918.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.581.278.982,00
 - Jumlah belanja hasil setelah Perubahan Rp297.467.196.982,00
- e. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp4.577.877.270.400,00
 - 2) Bertambah Rp 265.323.994.400,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp4.843.201.264.800,00
- f. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp30.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 7.000.000.000,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp37.000.000.000,00

Belanja Diarahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp944.428.245.150,00
 - 2) Bertambah Rp 62.200.358.080,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp1.006.628.603.230,00
- b. Belanja tidak
 - 1) Semula Rp866.922.339.100,00
 - 2) Bertambah Rp 18.094.626.550,00
 - Jumlah belanja tidak setelah Perubahan Rp885.016.965.650,00
- c. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp105.034.311.022,00
 - 2) Bertambah Rp 5.000.000.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp110.034.311.022,00
- d. Belanja hasil
 - 1) Semula Rp295.885.918.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.581.278.982,00
 - Jumlah belanja hasil setelah Perubahan Rp297.467.196.982,00
- e. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp4.577.877.270.400,00
 - 2) Bertambah Rp 265.323.994.400,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp4.843.201.264.800,00
- f. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp30.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 7.000.000.000,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp37.000.000.000,00

Belanja Diarahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp944.428.245.150,00
 - 2) Bertambah Rp 62.200.358.080,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp1.006.628.603.230,00
- b. Belanja tidak
 - 1) Semula Rp866.922.339.100,00
 - 2) Bertambah Rp 18.094.626.550,00
 - Jumlah belanja tidak setelah Perubahan Rp885.016.965.650,00
- c. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp105.034.311.022,00
 - 2) Bertambah Rp 5.000.000.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp110.034.311.022,00
- d. Belanja hasil
 - 1) Semula Rp295.885.918.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.581.278.982,00
 - Jumlah belanja hasil setelah Perubahan Rp297.467.196.982,00
- e. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp4.577.877.270.400,00
 - 2) Bertambah Rp 265.323.994.400,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp4.843.201.264.800,00
- f. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp30.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 7.000.000.000,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp37.000.000.000,00

Belanja Diarahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp944.428.245.150,00
 - 2) Bertambah Rp 62.200.358.080,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp1.006.628.603.230,00
- b. Belanja tidak
 - 1) Semula Rp866.922.339.100,00
 - 2) Bertambah Rp 18.094.626.550,00
 - Jumlah belanja tidak setelah Perubahan Rp885.016.965.650,00
- c. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp105.034.311.022,00
 - 2) Bertambah Rp 5.000.000.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp110.034.311.022,00
- d. Belanja hasil
 - 1) Semula Rp295.885.918.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.581.278.982,00
 - Jumlah belanja hasil setelah Perubahan Rp297.467.196.982,00
- e. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp4.577.877.270.400,00
 - 2) Bertambah Rp 265.323.994.400,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp4.843.201.264.800,00
- f. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp30.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 7.000.000.000,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp37.000.000.000,00

Pasal 5

Urutan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi APBD;
- c. Lampiran III : Ilustrasi Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi APBD, Pendapatan, Belanja dan Perimbangan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk "Keseluruhan" dan "Kategori Urusan Pemerintahan Daerah dan Prinsip Dilaras Kerangka Pengalokasian Keuangan Negara, Daerah Perubahan Jumlah Pegawai per Gedung dan per jabatan";
- f. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diajarkan dengan peraturan daerah;
- g. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- h. Lampiran IX : Daftar Pijuan Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Pemerintah menetapkan Peraturan tentang Pelebaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 September 2015
GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS EMEBE, SIP, MH

Ditandatangani di Jayapura
pada tanggal 8 September 2015
Wakil Gubernur Provinsi Papua
CAP/TTD
T. E. A. HEBY DOGIMABE, S.I.P., M.K.P.
Gubernur Provinsi Papua Tahun 2015 Nomor 2
"Salinan sesuai dengan aslinya"
Pt. KEPALA BIRO HUKUM,
MARTINUS ST. TUBULERUW, S.E., M.H.

KETERANGAN	URUSAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SEKELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5	6
PENDAPATAN					
		11.237.458.827.290,00	11.987.990.808.412,00	650.531.981.122,00	5,83
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	876.907.489.000,00	882.299.230.410,00	5.391.741.410,00	0,62
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	648.941.980.000,00	654.441.980.000,00	5.500.000.000,00	0,84
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.234.000.000,00	18.070.440.000,00	(163.560.000,00)	-0,90
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.279.000.000,00	14.828.178.770,00	(30.450.821.230,00)	-67,26
1.2	DANA PERKEMBANGAN	222.598.000.000,00	187.296.183.283,00	(35.301.816.717,00)	-15,86
1.2.1	Aksi Hasil Proyek/Bayar Hasil Bukan Pajak	1.861.243.694.000,00	1.427.230.230.000,00	(434.013.464.000,00)	-23,31
1.2.2	Gadaik Akademi Umum	648.000.000.000,00	518.000.000.000,00	(130.000.000.000,00)	-20,06
1.2.3	Sewa Akademi Khusus	2.277.032.000.000,00	2.277.032.000.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH TANG SAH	185.333.320.000,00	442.233.570.000,00	256.900.250.000,00	138,62
1.3.1	Restitusi Pajak	0,00	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00
1.3.2	Dana Penyesuaian / Dana BOS	427.146.000.000,00	427.146.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Operasi Alapad	4.340.429.000.000,00	4.340.429.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Transferan Pihak-Lain	2.083.800.000.000,00	2.204.000.000.000,00	120.200.000.000,00	5,78
2	BELANJA	12.016.588.825.500,00	12.098.462.296.790,00	81.873.471.290,00	0,68
BELANJA TIDAK LANGSUNG					
2.1		8.022.194.683.272,00	7.215.246.544.684,00	(806.948.138.588,00)	-10,06
2.1.1	Belanja Pegawai	844.438.293.230,00	838.628.893.230,00	(5.809.400.000,00)	-0,69
2.1.2	Belanja Hibah	884.232.230.000,00	885.214.945.000,00	982.715.000,00	0,11
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	100.239.751.000,00	100.239.751.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil pada Daerah Kependudukan/Manajemen/Manajemen	246.281.918.000,00	205.427.136.962,00	(140.784.881.038,00)	-57,17
2.1.5	Belanja Belanja Bantuan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota	4.177.271.278.400,00	4.263.261.266.000,00	85.989.987.600,00	2,06
2.1.6	Belanja Belanja Bantuan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Kelautan dan Perikanan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Belanja Bantuan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Kelautan dan Perikanan	0,00	4.177.271.278.400,00	4.177.271.278.400,00	0,00
2.1.8	Belanja Belanja Bantuan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Kelautan dan Perikanan	0,00	214.640.000.000,00	214.640.000.000,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.994.394.142.228,00	4.883.215.752.106,00	888.821.609.878,00	22,25
2.2.1	Belanja Pegawai	3.123.882.411.996,00	3.730.731.436,00	606.849.024.000,00	19,42

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTARIFAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5	6
1.1.1	Balaya Modal	2.701.257.805.002,00	3.168.733.331.332,00	370.474.743.540,00	13,44
	SURPLUS / (DEFISIT)	(178.101.998.330,00)	21.200.064.548.249,00	(702.702.548.749,00)	121,36
3.	PEMBAYARAN DAERAH				
3.1	PENDIRIMAAN PEMBAYARAN DAERAH	628.101.998.330,00	1.300.064.548.249,00	671.762.548.749,00	107,91
3.1.1	Sisa Lebih Pembagian Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	378.101.998.330,00	1.095.064.548.249,00	677.762.548.749,00	179,29
3.1.2	Pencarian Dana Cadangan	250.000.000.000,00	205.000.000.000,00	3,00	0,08
3.2	PENGELUARAN PEMBAYARAN DAERAH	30.000.000.000,00	25.000.000.000,00	(25.000.000.000,00)	(30,00)
3.2.1	Pengertian Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30.000.000.000,00	25.000.000.000,00	(25.000.000.000,00)	(30,00)
	PEMBAYARAN NETTO	578.101.998.330,00	1.275.064.548.249,00	702.762.548.749,00	121,56
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKEMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00


 1 September 2015
 GOVERNOR PAPUA
 EDUARDUS LEMBE, S.P., M.M.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Revisi Perencanaan : 1.1.01 Urutan Kerja Pendidikan
 Revisi Rincian : 1.1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.1.01.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTUBUHAN / (BERUBAH)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	BELANJA				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
	Belanja Pegawai	22.849.520.000,00	24.425.038.000,00	21.710.000,00	0,09
	BELANJA LANGSUNG				
	Belanja Pegawai	26.515.042.000,00	26.802.140.000,00	12.388.070.000,00	46,71
	Belanja Barang	36.515.042.000,00	36.802.140.000,00	12.388.070.000,00	46,71
	Belanja Modal	46.204.498.000,00	72.717.417.000,00	9.512.919.000,00	20,80
	SURPLUS / (DEFISIT)	6.241.960.000,00	7.222.940.000,00	970.980.000,00	15,55
	SISA LEHUR PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERSEKUTAN	23.428.422.000,00	40.220.842.000,00	7.792.420.000,00	33,26
	SURPLUS / (DEFISIT)	6.241.960.000,00	7.222.940.000,00	970.980.000,00	15,55
	SISA LEHUR PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERSEKUTAN	23.428.422.000,00	40.220.842.000,00	7.792.420.000,00	33,26

8 September 2015
 WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI PAPUA

 LISA ANTONI, S.P., M.H.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Revisi Perencanaan : 1.02 Urutan Kerja Kesehatan
 Revisi Rincian : 1.02.01 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 Dinas Kesehatan

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTUBUHAN / (BERUBAH)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pajak Retribusi Daerah	400.000.000,00	380.000.000,00	(20.000.000,00)	(5,00)
	BELANJA				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
	Belanja Pegawai	287.728.000,00	294.028.000,00	6.300.000,00	2,19
	BELANJA LANGSUNG				
	Belanja Pegawai	74.170.000,00	74.170.000,00	0,00	0,00
	Belanja Barang	32.000.000,00	31.770.000,00	(230.000,00)	(0,72)
	Belanja Modal	233.870.000,00	234.240.000,00	370.000,00	0,16
	SURPLUS / (DEFISIT)	6.241.960.000,00	6.241.960.000,00	0,00	0,00
	SISA LEHUR PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERSEKUTAN	23.428.422.000,00	23.428.422.000,00	0,00	0,00

8 September 2015
 WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI PAPUA

 LISA ANTONI, S.P., M.H.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

Unit Pemerintahan : 1. 02 Urusan Umum Pemerintahan
 Organisasi : 1. 02. 02 Rincian Sektoral Urusan Umum Pemerintahan
 Unit Organisasi : 1. 02. 02. 01 Rincian Sektoral Urusan Umum Pemerintahan

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	41.477.000.000,00	41.469.120.000,00	(7.880.000,00)	(0,02)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41.477.000.000,00	41.469.120.000,00	(7.880.000,00)	(0,02)
	Retribusi Daerah	41.477.000.000,00	41.469.120.000,00	(7.880.000,00)	(0,02)
	BELAJA	208.934.204.000,00	218.204.204.000,00	9.270.000.000,00	4,44
	BELAJA TIDAK LANGSUNG	84.704.204.000,00	91.704.204.000,00	7.000.000.000,00	8,26
	Bantuan Pegawai	84.704.204.000,00	91.704.204.000,00	7.000.000.000,00	8,26
	BELAJA LANGSUNG	222.230.000.000,00	226.500.000.000,00	4.270.000.000,00	1,92
	Bantuan Pegawai	22.130.240.000,00	22.130.240.000,00	0,00	0,00
	Bantuan Barang dan Jasa	176.512.760.000,00	174.420.760.000,00	(2.092.000.000,00)	(1,19)
	Bantuan Modal	23.587.000.000,00	29.949.000.000,00	6.362.000.000,00	2,70
	SURPLUS / (DEFISIT)	(267.457.204.000,00)	(276.735.084.000,00)	(9.277.880.000,00)	3,43
	SISA LESEH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERAKHIR	(267.457.204.000,00)	(276.735.084.000,00)	(9.277.880.000,00)	3,43

8 September 2012
 Gubernur Papua

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

Unit Pemerintahan : 1. 02 Urusan Umum Pemerintahan
 Organisasi : 1. 02. 03 Rincian Sektoral Urusan Operasi-Kelembagaan
 Unit Organisasi : 1. 02. 03. 01 Rincian Sektoral Urusan Daerah Kelembagaan

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	11.811.000.000,00	11.949.700.000,00	138.700.000,00	1,18
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.811.000.000,00	11.949.700.000,00	138.700.000,00	1,18
	Retribusi Daerah	11.811.000.000,00	11.949.700.000,00	138.700.000,00	1,18
	Laburan Pembiayaan Asli Daerah yang Sisa	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
	BELAJA	221.094.275.815,00	225.112.812.815,00	4.018.537.000,00	1,79
	BELAJA TIDAK LANGSUNG	52.571.494.000,00	56.597.227.000,00	4.025.733.000,00	7,66
	Bantuan Pegawai	52.571.494.000,00	56.597.227.000,00	4.025.733.000,00	7,66
	BELAJA LANGSUNG	168.522.781.815,00	168.515.585.815,00	(7.196.000,00)	(0,00)
	Bantuan Pegawai	7.146.176.000,00	7.344.176.000,00	198.000.000,00	2,77
	Bantuan Barang dan Jasa	91.472.220.970,00	91.472.220.970,00	0,00	0,00
	Bantuan Modal	70.904.384.845,00	70.699.188.845,00	(205.196.000,00)	(0,29)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(209.286.275.815,00)	(213.163.112.815,00)	(3.876.837.000,00)	1,85
	SISA LESEH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERAKHIR	(209.286.275.815,00)	(213.163.112.815,00)	(3.876.837.000,00)	1,85

8 September 2012
 Gubernur Papua

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2012

Unit Organisasi : 1.02.04.01
 Uraian: 1.02.04.01.01
 Uraian: 1.02.04.01.01.01

KODE URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERBURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	3.231.960.000,00	3.231.960.000,00	0,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.231.960.000,00	3.231.960.000,00	0,00	0,00
	Hasil Retribusi Daerah	43.230.282.280,00	43.230.282.280,00	0,00	0,00
	BELANJA	12.890.414.990,00	12.890.414.990,00	0,00	0,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.890.414.990,00	12.890.414.990,00	0,00	0,00
	Belanja Pegawai	31.190.300.200,00	31.190.300.200,00	0,00	0,00
	BELANJA LANGSUNG	388.400.000,00	3.013.820.000,00	2.625.420.000,00	678,73
	Belanja Pegawai	31.890.310.000,00	31.890.310.000,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	8.302.988.280,00	8.302.988.280,00	0,00	0,00
	Belanja Modal	140.120.702.280,00	140.120.702.280,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	140.120.702.280,00	140.120.702.280,00	0,00	0,00
	SISA LEHET PEMBELAJAR ANGGARAN TAHUN BERKESINAMBUNG	140.120.702.280,00	140.120.702.280,00	0,00	0,00

Wakil Gubernur
 Gubernur
 WAKIL GUBERNUR, S.P., M.P.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2012

Unit Organisasi : 1.02.01
 Uraian: 1.02.01.01
 Uraian: 1.02.01.01.01

KODE URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERBURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	14.300.000,00	1.982.716.146,00	1.968.416.146,00	137,65
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	14.300.000,00	1.982.716.146,00	1.968.416.146,00	137,65
	Hasil Retribusi Daerah	14.300.000,00	30.000.000,00	16.000.000,00	111,96
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Lain	0,00	1.952.716.146,00	1.952.716.146,00	13,69
	BELANJA	2.050.095.000.000,00	2.034.001.774.000,00	16.093.226.000,00	0,78
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	43.214.711.000,00	50.464.000.000,00	7.249.289.000,00	16,78
	Belanja Pegawai	43.214.711.000,00	50.464.000.000,00	7.249.289.000,00	16,78
	BELANJA LANGSUNG	2.006.880.300.000,00	1.983.537.774.000,00	23.342.526.000,00	1,16
	Belanja Pegawai	10.902.475.000,00	10.902.475.000,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.995.977.800,00	1.972.635.274,00	23.342.526,00	1,16
	Belanja Modal	1.710.440.000,00	1.710.440.000,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	12.249.905.000,00	12.249.905.000,00	0,00	0,00
	SISA LEHET PEMBELAJAR ANGGARAN TAHUN BERKESINAMBUNG	12.249.905.000,00	12.249.905.000,00	0,00	0,00

Wakil Gubernur
 Gubernur
 WAKIL GUBERNUR, S.P., M.P.

Lampiran 1 Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2013
Tanggal 8 September 2013

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013

Struktur Pemerintahan : 1. 00 Dinas Wajib Pemertanian Pertanian
Organisasi : 1. 06. 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Unit Organisasi : 1. 06. 01. 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	0,00	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00
2	BELANJA	79.000.000,00	6.490.790.000,00	6.411.000.000,00	8,11
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.076.240.000,00	20.790.000,00	3.400.000.000,00	19,91
2.1.1	Belanja Pegawai	17.076.240.000,00	20.790.000,00	3.400.000.000,00	19,91
2.2	BELANJA LANGSUNG	6.923.760.000,00	6.469.990.000,00	453.770.000,00	6,55
2.2.1	Belanja Pegawai	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.883.760.000,00	6.429.990.000,00	413.770.000,00	6,01
2.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	279.000.000,00	286.009.990,00	7.009.990,00	2,51
	525A LEBIH PENDAPATAN ANGGARAN TAHUN BERKURANG	279.000.000,00	286.009.990,00	7.009.990,00	2,51

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
GUBERNUR PAPUA
8 September 2013

Lampiran 1 Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2013
Tanggal 8 September 2013

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013

Struktur Pemerintahan : 1. 07 Dinas Wajib Pertukangan
Organisasi : 1. 07. 01 Dinas Pertukangan
Unit Organisasi : 1. 07. 01. 01 Dinas Pertukangan

KODE URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	290.000.000,00	1.011.118.000,00	791.118.000,00	272,45
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	290.000.000,00	1.011.118.000,00	791.118.000,00	272,45
1.1.1	Hadiah Hibah dan Sumbangan	290.000.000,00	305.718.000,00	15.718.000,00	5,42
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	705.400.000,00	705.400.000,00	0,00
2	BELANJA	502.861.100,000,00	399.700.000,00	103.161.100,00	20,51
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.076.790.000,00	24.700.000,00	3.400.000.000,00	15,97
2.1.1	Belanja Pegawai	21.076.790.000,00	24.700.000,00	3.400.000.000,00	15,97
2.2	BELANJA LANGSUNG	491.784.310.000,00	375.000.000,00	116.784.310.000,00	23,75
2.2.1	Belanja Pegawai	491.784.310.000,00	375.000.000,00	116.784.310.000,00	23,75
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	290.000.000,00	611.418.000,00	321.418.000,00	110,83
	525A LEBIH PENDAPATAN ANGGARAN TAHUN BERKURANG	290.000.000,00	611.418.000,00	321.418.000,00	110,83

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
GUBERNUR PAPUA
8 September 2013

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Visi Pemerintahan : 1. 1. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1. 1. 08. 01 Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 1. 1. 08. 01. 01 Badan Pengelola Lingkungan Hidup

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	6
1	PENDAPATAN	0,00	124.962.471,00	124.962.471,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	124.962.471,00	124.962.471,00	0,00
1.1.1	Sisa Hasil Usaha/Keuntungan Asli Daerah yang Sah	0,00	124.962.471,00	124.962.471,00	0,00
2	BELANJA	25.499.314.900,00	25.499.321.800,00	2.890.713.000,00	25,49
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.173.171.800,00	8.862.884.800,00	1.890.713.000,00	23,13
2.1.1	Belanja Pegawai	8.173.171.800,00	8.862.884.800,00	1.890.713.000,00	23,13
2.1.1.1	Belanja Pegawai	15.327.142.000,00	15.827.142.000,00	500.000.000,00	3,26
2.1.1.2	Belanja Langgane	997.174.000,00	825.656.000,00	(171.518.000,00)	(17,09)
2.1.1.2.1	Belanja Pegawai	10.880.547.000,00	11.512.347.000,00	631.800.000,00	5,79
2.1.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.429.446.000,00	2.482.946.000,00	53.500.000,00	2,21
2.1.1.2.3	Belanja Modal				
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.499.314.900,00)	(22.369.764.329,00)	(2.890.713.000,00)	12,85
	SISA LEBIH PENDAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENDARAAN	(22.499.314.900,00)	(22.369.764.329,00)	(2.890.713.000,00)	12,85

Lampiran 1 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2015
Tanggal : 2 September 2015


 W. S. S. S.
 LUKISENINE, S.P., M.S.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Visi Pemerintahan : 1. 1. 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi : 1. 1. 11. 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1. 1. 11. 01. 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	6
1	BELANJA	19.811.542.000,00	23.308.444.074,00	3.496.902.074,00	17,65
1.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.489.742.000,00	3.489.775.000,00	3.489.775.000,00	100,00
1.1.1	Belanja Pegawai	3.489.742.000,00	3.489.775.000,00	3.489.775.000,00	100,00
2.1	BELANJA LANGSUNG	16.321.799.000,00	19.818.669.074,00	3.496.870.074,00	21,43
2.1.1	Belanja Pegawai	1.844.205.000,00	1.843.305.000,00	(900.000,00)	(0,05)
2.1.2	Belanja Pegawai	12.513.625.000,00	15.075.354.074,00	2.561.729.074,00	20,46
2.1.2.1	Belanja Pegawai dan Jasa	1.703.910.000,00	1.703.910.000,00		0,00
2.1.2.2	Belanja Modal				
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.811.542.000,00)	(23.308.444.074,00)	(3.496.902.074,00)	17,65
	SISA LEBIH PENDAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENDARAAN	(19.811.542.000,00)	(23.308.444.074,00)	(3.496.902.074,00)	17,65

Lampiran 1 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2015
Tanggal : 2 September 2015


 W. S. S. S.
 LUKISENINE, S.P., M.S.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

Unit Pemerintahan : 1. 1. 13
 Organisasi : 1. 1. 13. 01
 Sub Unit Organisasi : 1. 1. 13. 01. 01

Unit Kerja : Dinas Sosial
 Dinas Sosial dan Perempuan
 Dinas Sosial dan Perempuan

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	DITELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
		33.710.583.000,00	37.198.273.880,00	3.487.690.880,00	11,54
1.	BELANJA	22.129.583.000,00	24.198.273.880,00	2.068.690.880,00	23,01
1.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.428.583.000,00	28.038.273.880,00	5.609.690.880,00	24,99
1.1.1	Belanja Pegawai	17.536.000.000,00	18.180.000.000,00	644.000.000,00	3,69
1.1.2	BELANJA LANGSUNG	8.990.000,00	9.998.880,00	1.008.880,00	11,22
1.1.2.1	Belanja Pegawai	8.990.000,00	9.998.880,00	1.008.880,00	11,22
1.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.710.583.000,00)	(6.700.273.880,00)	(4.009.309.120,00)	37,34
SISA LEbih PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERSEKUTAN		(10.710.583.000,00)	(6.700.273.880,00)	(4.009.309.120,00)	37,34

8 September 2013
 Gubernur Papua
 LUAR BIASA: S.P. M.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

Unit Pemerintahan : 1. 1. 14
 Organisasi : 1. 1. 14. 01
 Sub Unit Organisasi : 1. 1. 14. 01. 01

Unit Kerja : Dinas Sosial Tenaga Kerja
 Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
 Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	DITELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
		175.000.000,00	174.000.000,00	(1.000.000,00)	-0,57
1.	PENDAPATAN KEGIATAN DAERAH	175.000.000,00	174.000.000,00	(1.000.000,00)	-0,57
1.1	Pada Anggaran Daerah	175.000.000,00	174.000.000,00	(1.000.000,00)	-0,57
1.1.1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Lain	0,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00
2.	BELANJA	20.142.273.200,00	19.200.000.000,00	(942.273.200,00)	-4,68
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.000.000.000,00	17.510.000.000,00	(490.000.000,00)	-2,72
2.1.1	Belanja Pegawai	18.000.000.000,00	17.510.000.000,00	(490.000.000,00)	-2,72
2.1.2	BELANJA LANGSUNG	2.142.273.200,00	1.690.000.000,00	(452.273.200,00)	-21,11
2.1.2.1	Belanja Pegawai	2.142.273.200,00	1.690.000.000,00	(452.273.200,00)	-21,11
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.142.273.200,00)	(10.200.000.000,00)	(57.726.800,00)	-0,57
SISA LEbih PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERSEKUTAN		(10.142.273.200,00)	(10.200.000.000,00)	(57.726.800,00)	-0,57

8 September 2013
 Gubernur Papua
 LUAR BIASA: S.P. M.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran 1 Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2015
Tanggal 8 September 2015

Uraian Pemerintah : 1. 10. Uraian: Wajik, Karama dan Uluwa Ex-2 Heterogen
Organisasi : 1. 10. 01 Dinas Kependidikan, Kebudayaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1. 10. 01. 01 Dinas Kependidikan, Kebudayaan dan Olahraga

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2	BELANJA	24.417.950.000,00	25.284.150.000,00	1.966.200.000,00	8,05
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.417.300.000,00	10.884.148.800,00	1.466.848.800,00	15,57
2.1.1	Belanja Pegawai	9.417.300.000,00	10.884.148.800,00	1.466.848.800,00	15,57
2.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.650.000,00	14.399.901.200,00	-600.748.800,00	-3,99
2.2.1	Belanja Pegawai	1.471.700.000,00	1.487.810.000,00	16.110.000,00	1,10
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.528.948.000,00	12.741.117.000,00	212.169.000,00	1,70
2.2.3	Belanja Hibah	1.000.002.000,00	971.081.200,00	-28.920.800,00	-2,89
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.417.950.000,00)	(25.284.150.000,00)	(1.966.200.000,00)	-7,97
	SISA LEGIS PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMBANG	(24.417.950.000,00)	(25.284.150.000,00)	(1.966.200.000,00)	-7,97

Disetujui dan Ditetapkan di Jayapura, 8 September 2015
Gubernur Papua
[Signature]
[Stamp]



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran 1 Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2015
Tanggal 8 September 2015

Uraian Pemerintah : 1. 10. Uraian: Bani, Hanyar, Hanyar, Hanyar, Hanyar, Hanyar
Organisasi : 1. 10. 01 Dinas Kependidikan, Kebudayaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1. 10. 01. 01 Dinas Kependidikan, Kebudayaan dan Olahraga

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1	Uraian Pendapatan Asli Daerah yang Baru	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2	BELANJA	20.477.851.000,00	21.024.300.000,00	546.449.000,00	2,67
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.550.000.000,00	5.000.000.000,00	450.000.000,00	9,89
2.1.1	Belanja Pegawai	4.550.000.000,00	5.000.000.000,00	450.000.000,00	9,89
2.2	BELANJA LANGSUNG	15.927.851.000,00	16.024.300.000,00	96.449.000,00	0,61
2.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.727.851.000,00	14.824.300.000,00	1.096.449.000,00	7,99
2.2.3	Belanja Hibah	999.999.999,99	999.999.999,99	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.477.851.000,00)	(21.024.300.000,00)	(546.449.000,00)	-2,67
	SISA LEGIS PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMBANG	(20.477.851.000,00)	(21.024.300.000,00)	(546.449.000,00)	-2,67

Disetujui dan Ditetapkan di Jayapura, 8 September 2015
Gubernur Papua
[Signature]
[Stamp]

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

Asas Perencanaan : 1. 10 Misi/Wakil Menteri dan Wakil
 Organisasi : 1. 12. 01 Dinas (Dan) Kepala Daerah
 Sub Unit Organisasi : 1. 12. 01. 01 Dinas (Dan) Kepala Daerah

NOMOR UNIT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	0,00	304.810.000,00	304.810.000,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	304.810.000,00	304.810.000,00	0,00
	Head Kotor/Dari Daerah	0,00	304.810.000,00	304.810.000,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.329.501.000,00	28.329.501.000,00	11.290.314.200,00	39,89
	BELANJA	6.280.021.000,00	12.422.475.000,00	6.142.954.000,00	97,88
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.280.021.000,00	12.422.475.000,00	3.142.454.000,00	33,86
	Belanja Pegawai	33.943.490.000,00	23.718.180.000,00	10.225.310.000,00	30,15
	BELANJA LANGSUNG	3.709.289.000,00	3.969.420.000,00	259.131.000,00	6,98
	Belanja Pegawai	11.794.180.000,00	13.448.420.000,00	1.654.240.000,00	14,03
	Belanja Barang dan Jasa	3.389.499.000,00	3.287.120.000,00	102.379.000,00	3,02
	Belanja Modal				
	SURPLUS / (DEFISIT)	22.049.480.000,00	15.907.026.000,00	6.142.954.000,00	27,88
	SISA LEBIH PESENYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMBAH	128.129.511.889,00	129.125.940.889,00	1.000.000,00	0,78

9 September 2012
 Gubernur Papua
 OLINGGINSI, S.P., M.P.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

Asas Perencanaan : 1. 10 Misi/Wakil Menteri dan Wakil Kepala Daerah
 Organisasi : 1. 12. 01 Dinas (Dan) Kepala Daerah
 Sub Unit Organisasi : 1. 12. 01. 01 Dinas (Dan) Kepala Daerah

NOMOR UNIT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	0,00	81.000.710,00	81.000.710,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	81.000.710,00	81.000.710,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Tetap	0,00	81.000.710,00	81.000.710,00	0,00
		2.993.490.000,00	28.993.490.000,00	25.999.999,99	0,87
	BELANJA	1.313.000.000,00	7.999.490.000,00	6.686.490.000,00	50,93
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.100.000.000,00	7.999.490.000,00	1.899.490.000,00	31,14
	Belanja Pegawai	24.999.999.999,00	25.400.000.000,00	400.000,00	0,16
	BELANJA LANGSUNG	1.313.000.000,00	1.399.999.999,99	86.999.999,99	6,63
	Belanja Pegawai	23.814.110.000,00	23.814.110.000,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	3.118.890.000,00	3.118.890.000,00	0,00	0,00
	Belanja Modal				
	SURPLUS / (DEFISIT)	16.036.480.000,00	20.994.000.000,00	4.957.520.000,00	30,92
	SISA LEBIH PESENYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMBAH	128.129.511.889,00	129.125.940.889,00	1.000.000,00	0,78

9 September 2012
 Gubernur Papua
 OLINGGINSI, S.P., M.P.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1. 00 Urusan Wajib Daerah Daerah, Pemerintahan Umum, dan KUDA, Perangkat Daerah, Pemerintahan
 Organisasi : 1. 00. 02. Raja-raja Daerah dan Wakil Raja-raja Daerah
 Sub Unit Organisasi : 1. 00. 02. 01 Raja-raja Daerah

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERUBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5	6
	BELANJA	22.022.347.000,00	22.582.947.000,00	560.600.000,00	2,55
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.022.347.000,00	22.582.947.000,00	560.600.000,00	2,55
	Belanja Pegawai	22.022.347.000,00	22.582.947.000,00	560.600.000,00	2,55
	SURPLUS / (DEFISIT)	22.022.347.000,00	22.582.947.000,00	560.600.000,00	2,55
	SEKILAH BERSIH PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN BERKETAHAN	22.022.347.000,00	22.582.947.000,00	560.600.000,00	2,55

8 September 2015
 GOVERNOR PAPUA

 LUKAS LUMIBING, S.P., M.M.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1. 00 Urusan Wajib Daerah Daerah, Pemerintahan Umum, dan KUDA, Perangkat Daerah, Pemerintahan
 Organisasi : 1. 00. 02. Raja-raja Daerah dan Wakil Raja-raja Daerah
 Sub Unit Organisasi : 1. 00. 02. 01 Raja-raja Daerah

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERUBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5	6
	BELANJA	758.479.000,00	888.383.782,00	129.904.782,00	17,13
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	758.479.000,00	888.383.782,00	129.904.782,00	17,13
	Belanja Pegawai	758.479.000,00	888.383.782,00	129.904.782,00	17,13
	SURPLUS / (DEFISIT)	758.479.000,00	888.383.782,00	129.904.782,00	17,13
	SEKILAH BERSIH PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN BERKETAHAN	758.479.000,00	888.383.782,00	129.904.782,00	17,13

8 September 2015
 GOVERNOR PAPUA

 LUKAS LUMIBING, S.P., M.M.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN BUDGET 2013

Lembar Perencanaan : 1. 20 Urusan Wajib Daerah Daerah, Pemerintahan Umum, KSA, KSD, Kesehatan, Pendidikan, Perumahan
 Organisasi : 1. 20. 02 Kepadatan Daerah dan Bina Kepadatan Daerah
 Sub Organisasi : 1. 20. 02. 02 Bina Kepadatan Daerah

KODIC DAERAH	URUSAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA	726.811.000,00	722.511.200,00	(4.299.800,00)	-0,59
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	726.811.000,00	722.511.200,00	(4.299.800,00)	-0,59
	Belanja Pegawai	726.811.000,00	722.511.200,00	(4.299.800,00)	-0,59
	SURPLUS / (DEFISIT)	(726.811.000,00)	(722.511.200,00)	(4.299.800,00)	-0,59
	SISA LEBIH PENDAFTARAN ANGGARAN TAHUN BERKURANG	(726.811.000,00)	(722.511.200,00)	(4.299.800,00)	-0,59

8 September 2013
 Gubernur Papua

 LUKAS DUMEZ, S.P., Ph.D.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN BUDGET 2013

Lembar Perencanaan : 1. 20 Urusan Wajib Daerah Daerah, Pemerintahan Umum, KSA, KSD, Kesehatan, Pendidikan, Perumahan
 Organisasi : 1. 20. 02 Kepadatan Daerah dan Bina Kepadatan Daerah

KODIC DAERAH	URUSAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAFTARAN	2.221.894.000,00	2.227.422.200,00	5.528.200,00	0,25
	PENDAFTARAN ASLI DAERAH	2.221.894.000,00	2.227.422.200,00	5.528.200,00	0,25
	Instansi Pemerintah	221.894.000,00	227.422.200,00	5.528.200,00	2,50
	Layanan Pengabdian ke Daerah yang Lain	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	BELANJA	622.894.400.000,00	622.894.400.000,00	0,00	0,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	622.894.400.000,00	622.894.400.000,00	0,00	0,00
	Belanja Pegawai	622.894.400.000,00	622.894.400.000,00	0,00	0,00
	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(622.894.400.000,00)	(622.894.400.000,00)	0,00	0,00
	SISA LEBIH PENDAFTARAN ANGGARAN TAHUN BERKURANG	(622.894.400.000,00)	(622.894.400.000,00)	0,00	0,00

8 September 2013
 Gubernur Papua

 LUKAS DUMEZ, S.P., Ph.D.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

Unit Organisasi : 1. 1. 20 Urusan Rumah Tangga Daerah, Pemerintahan Umum, dan Kelembagaan, Perangko Daerah, Kependidikan
 1. 1. 20. 01 Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
 1. 1. 20. 01. 01 Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

KODE UNIT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTARIFAN / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	0,00	212.000.000,00	212.000.000,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	212.000.000,00	212.000.000,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Tetap	0,00	212.000.000,00	212.000.000,00	0,00
	BELANJA	346.782.422.700,00	346.429.927.700,00	346.429.927.700,00	11,70
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.000.000.000,00	11.724.941.200,00	11.724.941.200,00	25,10
	Belanja Pegawai	3.000.000.000,00	11.724.941.200,00	11.724.941.200,00	35,21
	BELANJA LANGSUNG	342.782.422.700,00	334.704.986,50	334.704.986,50	10,00
	Belanja Pegawai	22.874.740.000,00	17.690.740.000,00	17.690.740.000,00	22,28
	Belanja Barang dan Jasa	268.295.000.000,00	306.284.422.200,00	306.284.422.200,00	118,60
	Belanja Modal	52.612.682.700,00	60.729.824.300,00	60.729.824.300,00	115,43
	SURPLUS / (DEFISIT)	(346.782.422.700,00)	(134.429.927.700,00)	134.429.927.700,00	12,74
	SISA LEBIH PELEBIHAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(346.782.422.700,00)	(134.429.927.700,00)	134.429.927.700,00	12,74



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

Unit Organisasi : 1. 1. 20 Urusan Rumah Tangga Daerah, Pemerintahan Umum, dan Kelembagaan, Perangko Daerah, Kependidikan
 1. 1. 20. 01 Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
 1. 1. 20. 01. 01 Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

KODE UNIT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTARIFAN / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	0,00	212.000.000,00	212.000.000,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	212.000.000,00	212.000.000,00	0,00
	Hati-hati Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Tetap	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	BELANJA	324.524.422.700,00	324.429.927.000,00	324.429.927.000,00	100,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	147.717.004.200,00	148.206.144.000,00	148.206.144.000,00	100,00
	Belanja Pegawai	147.717.004.200,00	148.206.144.000,00	148.206.144.000,00	100,00
	BELANJA LANGSUNG	176.807.418.500,00	176.223.783.000,00	176.223.783.000,00	100,00
	Belanja Pegawai	17.811.920.000,00	20.133.772.000,00	20.133.772.000,00	112,48
	Belanja Barang dan Jasa	158.995.498.500,00	156.089.811.000,00	156.089.811.000,00	98,18
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(324.524.422.700,00)	(112.429.927.000,00)	112.429.927.000,00	100,00
	SISA LEBIH PELEBIHAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(324.524.422.700,00)	(112.429.927.000,00)	112.429.927.000,00	100,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Tahun Anggaran 2025

Konvensional : 1 1 20 13 April 2025
Elektronik : 2 2 20 20 02 03 April 2025
Jumlah Anggarkan : 3 3 20 20 02 03 14 April 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / PENGURANGAN	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	10.046.434.210.000,00	11.226.241.911.270,00	1.179.807.701,00	11,75
PENDAPATAN KOTA DAERAH	143.871.300.000,00	154.068.181.230,00	10.196.881.230,00	7,09
Haci Penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan Perseorangan dan Badan	40.227.000.000,00	39.000.120.120,00	(1.226.880.000,00)	(3,05)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	103.644.300.000,00	115.068.061.110,00	11.423.761.110,00	11,02
DANA PERHIMPUNAN	1.103.243.150.000,00	1.457.232.220.000,00	353.989.070,00	32,12
Bagi Hasil Pajak/Bayar Hasil Bukan Pajak	500.000.000.000,00	720.700.120.000,00	220.700.120,00	44,14
Bagi Hasil Uprah	2.277.210.000.000,00	2.277.210.000.000,00	0,00	0,00
Dana Hibah/Wakaf	300.000.000.000,00	460.300.000.000,00	160.300.000,00	53,43
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.207.570.000.000,00	7.698.064.250.000,00	490.494.250,00	6,80
Pendapatan Hibah	0,00	400.000.000,00	400.000,00	0,00
Dana Penunjang / Dana B2G	457.500.000.000,00	457.500.000.000,00	0,00	0,00
Dana Diserahi Aktiva	4.940.420.000.000,00	4.940.420.000.000,00	0,00	0,00
Dana Tambahan B-Fasilitas	2.809.650.000.000,00	2.809.650.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA	6.203.719.200.000,00	6.246.212.700.000,00	42.500.000.000,00	6,85
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.875.213.900.000,00	4.146.715.700.000,00	271.500.000.000,00	7,03
Belanja Hibah	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak dan Hasil Usaha Lainnya	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemda/Instansi Lain, Kementerian/Kantor dan Pihak Lain	1.175.213.900.000,00	1.446.715.700.000,00	271.500.000.000,00	23,11
Belanja Tidak Langsung	0,00	0,00	0,00	0,00
BERKURANG / (BERKURANG)	4.799.264.400.000,00	5.010.959.500.000,00	211.695.100.000,00	4,41

URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / PENGURANGAN	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5
PEMBAYARAN DAERAH				
PEMBAYARAN DAERAH	426.000.000.000,00	1.209.864.340.000,00	783.864.340,00	183,77
Sisa Lebih Pembayaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	276.000.000.000,00	1.033.864.340.000,00	757.864.340,00	274,58
Beban Dana Cadangan	150.000.000.000,00	176.000.000.000,00	26.000.000,00	17,33
PENGELUARAN PEMBAYARAN DAERAH	50.000.000.000,00	21.000.000.000,00	(29.000.000.000,00)	(58,00)
Pengembalian Modal (Pinjaman) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	21.000.000.000,00	(29.000.000.000,00)	(58,00)
PEMBAYARAN NETTO	376.000.000.000,00	1.188.864.340.000,00	812.864.340,00	216,20
SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKURANG	5.343.210.497.570,00	6.371.847.713.030,00	1.028.637.215.460,00	19,27



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Kekuasaan, Perangai Daerah, Kependidikan
 1. 20. 01 Propinsi
 1. 20. 01. 01 Propinsi

Kategori	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5	6
	BELANJA	26.862.783.000,00	31.389.762.000,00	2.723.918.000,00	5,44
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.865.783.000,00	9.289.762.000,00	1.223.918.000,00	15,56
	Belanja Pegawai	7.865.783.000,00	9.289.762.000,00	1.223.918.000,00	15,56
	BELANJA LANGSUNG	21.000.000.000,00	22.100.000.000,00	1.100.000.000,00	5,24
	Belanja Pegawai	7.217.140.000,00	8.213.340.000,00	996.200.000,00	13,8
	Belanja Barang dan Jasa	13.782.860.000,00	13.886.660.000,00	2.271.200.000,00	16,5
	Belanja Modal	300.000.000,00	297.470.000,00	(2.530.000,00)	(0,84)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.862.783.000,00)	(31.389.762.000,00)	(2.723.918.000,00)	5,4
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKESIAAN	(26.862.783.000,00)	(31.389.762.000,00)	(2.723.918.000,00)	5,4

8 September 2015
 Gubernur PAPUA

 LUKAS KEMARU, S.P., MH.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Kekuasaan, Perangai Daerah, Kependidikan
 1. 20. 01 Badan Penghubung Daerah
 1. 20. 01. 01 Badan Penghubung Daerah

Kategori	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5	6
	BELANJA	12.234.513.000,00	18.088.254.000,00	5.853.841.000,00	47,89
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.289.513.000,00	8.675.840.000,00	1.406.327.000,00	19,29
	Belanja Pegawai	5.268.513.000,00	6.671.840.000,00	1.406.327.000,00	26,71
	BELANJA LANGSUNG	4.945.000.000,00	9.412.414.000,00	4.467.414.000,00	90,39
	Belanja Pegawai	1.114.375.000,00	1.102.275.000,00	(12.100.000,00)	(1,08)
	Belanja Barang dan Jasa	3.830.625.000,00	8.310.139.000,00	4.479.464.000,00	117,2
	Belanja Modal	2.210.000.000,00	1.767.800.000,00	(442.200.000,00)	(20,01)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.234.513.000,00)	(18.088.254.000,00)	(5.853.841.000,00)	47,89
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKESIAAN	(12.234.513.000,00)	(18.088.254.000,00)	(5.853.841.000,00)	47,89

8 September 2015
 Gubernur PAPUA

 LUKAS KEMARU, S.P., MH.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1. 20 - Urusan Wakil Gubernur Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. KeuDa, Perangko Daerah, Kepegawaian
 Bidang Pengada Perbaikan dan Kapasitas Luar Negeri
 Sub Bidang Pengada Perbaikan dan Kapasitas Luar Negeri

URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
3	3	4	5	6
BELANJA	11.595.211.000,00	20.535.153.000,00	8.939.942.000,00	7,74
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.110.211.000,00	7.396.496.000,00	(713.715.000,00)	(8,80)
Belanja Pegawai	8.110.211.000,00	7.396.496.000,00	(713.715.000,00)	(8,80)
BELANJA LANGSUNG	3.485.000.000,00	13.138.657.000,00	9.653.657.000,00	277,91
Belanja Pegawai	1.371.870.000,00	1.400.170.000,00	28.300.000,00	2,06
Belanja Barang dan Jasa	1.113.130.000,00	11.737.130.000,00	10.624.000.000,00	954,81
Belanja Modal	2.207.720.000,00	2.941.420.000,00	733.700.000,00	33,24
SURPLUS / (DEFISIT)	(11.595.211.000,00)	(20.535.153.000,00)	(8.939.942.000,00)	7,74
SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERSEKUTU	(11.595.211.000,00)	(20.535.153.000,00)	(8.939.942.000,00)	7,74

8 September 2014
 GUBERNUR PAPUA

 LUKAS DOREMAS, S.P., M.M.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi : 1. 20 - Urusan Wakil Gubernur Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. KeuDa, Perangko Daerah, Kepegawaian
 Bidang Pengada Perbaikan dan Kapasitas Luar Negeri
 Sub Bidang Pengada Perbaikan dan Kapasitas Luar Negeri

URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
3	3	4	5	6
BELANJA	13.532.963.000,00	13.532.963.000,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.532.963.000,00	13.532.963.000,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai	13.532.963.000,00	13.532.963.000,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(13.532.963.000,00)	(13.532.963.000,00)	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERSEKUTU	(13.532.963.000,00)	(13.532.963.000,00)	0,00	0,00

8 September 2014
 GUBERNUR PAPUA

 LUKAS DOREMAS, S.P., M.M.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Dasar Hukum : 1. UU Urutan Matrik Organisasi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Umum, Amd. KeDa, Perangkat Daerah, Anggaran
 2. UU 23/2012 Sekretariat Provinsi Papua
 3. UU 23/2011 Sekretariat Provinsi Papua

URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTYAMBAN / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
2	3	4	5	6
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	407.625.000,00	407.625.000,00	0,00
<i> </i>	0,00	407.625.000,00	407.625.000,00	0,00
<i> </i>	0,00	407.625.000,00	407.625.000,00	0,00
BELANJA	28.515.551.000,00	9.770.240.999,00	9.796.267.000,00	15,77
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.513.551.000,00	3.710.140.000,00	3.196.387.000,00	26,51
<i> </i>	4.513.551.000,00	3.710.140.000,00	3.196.387.000,00	26,51
BELANJA LANGSUNG	24.002.000.000,00	6.060.100.999,00	7.599.880.000,00	12,73
<i> </i>	4.222.576.000,00	3.261.575.000,00	741.000.000,00	17,35
<i> </i>	20.779.424.000,00	2.798.525.000,00	6.858.750.000,00	11,56
<i> </i>	0,00	388.525.000,00	388.250.000,00	0,90
SURPLUS / (DEFISIT)	(28.515.551.000,00)	(47.362.515.000,00)	(17.286.940.000,00)	23,08
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERSEKUTU	(28.515.551.000,00)	(47.362.515.000,00)	(17.286.940.000,00)	23,08

8 September 2015
 GUBERNUR PAPUA


PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Dasar Hukum : 1. UU Urutan Matrik Organisasi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Umum, Amd. KeDa, Perangkat Daerah, Anggaran
 2. UU 23/2012 Sekretariat Daerah
 3. UU 23/2011 Sekretariat Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTYAMBAN / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
2	3	4	5	6
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	446.475.980.000,00	478.210.220.000,00	31.734.240.000,00	7,10
<i> </i>	446.475.980.000,00	478.210.220.000,00	31.734.240.000,00	7,10
<i> </i>	446.475.980.000,00	478.210.220.000,00	31.734.240.000,00	7,10
<i> </i>	20.000.000,00	21.000.000,00	1.000.000,00	0,05
<i> </i>	0,00	18.740.220.000,00	18.740.220.000,00	0,00
BELANJA	124.228.277.000,00	140.220.500.000,00	9.272.223.000,00	7,46
BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.825.875.950,00	19.888.875.800,00	9.272.223.000,00	8,38
<i> </i>	41.829.475.800,00	19.888.875.800,00	9.272.223.000,00	5,08
BELANJA LANGSUNG	102.392.391.050,00	120.331.624.200,00	0,00	0,00
<i> </i>	2.227.120.000,00	2.227.120.000,00	0,00	0,00
<i> </i>	42.212.120.000,00	42.212.120.000,00	0,00	0,00
<i> </i>	2.000.750.000,00	24.892.384.200,00	22.891.634.200,00	11,44
SURPLUS / (DEFISIT)	322.247.703.000,00	337.989.720.000,00	15.742.017.000,00	4,88
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERSEKUTU	322.247.703.000,00	337.989.720.000,00	15.742.017.000,00	4,88

8 September 2015
 GUBERNUR PAPUA


PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2011

1. 20 Urusan Wajib Lainnya Daerah, Pemeliharaan Urusan, Administrasi, Perangko Daerah, Reprogramasi
 1. 20. 13 Badan Reprogramasi Daerah
 1. 20. 13. 01 Badan Kepegawaian Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
	3	4	5	6
BELANJA				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	47.188.156.000,00	47.188.156.000,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai	10.000.156.000,00	12.850.833.000,00	2.750.677.000,00	27,50
BELANJA LANGSUNG	10.000.156.000,00	12.850.833.000,00	2.750.677.000,00	27,50
Belanja Pegawai	29.100.000.000,00	34.217.267.000,00	4.717.267.000,00	16,21
Belanja Pegawai	5.141.370.000,00	5.170.000.000,00	28.630.000,00	0,56
Belanja Barang dan Jasa	32.476.647.750,00	23.992.814.750,00	(8.483.833.000,00)	(26,12)
Belanja Modal	1.481.960.250,00	1.577.062.250,00	95.102.000,00	6,42
SURPLUS / (DEFISIT)	(49.100.156.000,00)	(47.188.156.000,00)	1.912.000.000,00	3,90
SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKURANG	(49.100.156.000,00)	(47.188.156.000,00)	1.912.000.000,00	3,90

8 September 2011
 GOVERNOR PAPUA

 LUKAS ENEMBE, S.P., M.P.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2011

1. 20 Urusan Wajib Lainnya Daerah, Pemeliharaan Urusan, Administrasi, Perangko Daerah, Reprogramasi
 1. 20. 13 Badan Kepegawaian Daerah
 1. 20. 13. 01 Badan Kepegawaian Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
	3	4	5	6
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Hasil Retribusi Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
BELANJA	34.112.000.000,00	35.845.441.000,00	1.733.441.000,00	5,09
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.212.000.000,00	8.214.461.000,00	2.461.000,00	0,03
Belanja Pegawai	8.212.000.000,00	8.214.461.000,00	2.461.000,00	0,03
BELANJA LANGSUNG	25.900.000.000,00	26.130.980.000,00	230.980.000,00	0,89
Belanja Pegawai	1.817.500.000,00	1.814.600.000,00	(2.900.000,00)	(0,16)
Belanja Barang dan Jasa	20.215.820.000,00	20.613.000.000,00	407.180.000,00	2,01
Belanja Modal	3.866.680.000,00	4.702.380.000,00	835.700.000,00	21,62
SURPLUS / (DEFISIT)	(34.112.000.000,00)	(35.830.441.000,00)	(1.718.441.000,00)	5,04
SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKURANG	(34.112.000.000,00)	(35.830.441.000,00)	(1.718.441.000,00)	5,04

8 September 2011
 GOVERNOR PAPUA

 LUKAS ENEMBE, S.P., M.P.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Disusun oleh: 1. 1. 20 Menteri Dalam Negeri dan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Republik Indonesia
 1. 1. 20. 04 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Papua
 1. 1. 20. 05. 01 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Papua

URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
3	3	4	5	6
BELANJA	16.521.000.000,00	19.524.813.000,00	3.003.813.000,00	17,11
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.476.000.000,00	8.774.813.000,00	2.298.813.000,00	35,29
Belanja Pegawai	6.476.000.000,00	8.774.813.000,00	2.298.813.000,00	35,29
BELANJA LANGSUNG	10.045.000.000,00	10.750.000.000,00	705.000.000,00	7,04
Belanja Pegawai	10.045.000.000,00	10.750.000.000,00	705.000.000,00	7,04
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	13.545.000.000,00	13.545.000.000,00	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKURANG	13.545.000.000,00	13.545.000.000,00	0,00	0,00

8 September 2015
 Gubernur Papua
 LUKAS BEREND, S.P., M.P.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Disusun oleh: 1. 1. 20 Menteri Dalam Negeri dan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Republik Indonesia
 1. 1. 20. 04 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Papua
 1. 1. 20. 05. 01 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Papua

URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
3	3	4	5	6
PENDAPATAN	0,00	26.434.000,00	26.434.000,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	26.434.000,00	26.434.000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Lain	0,00	26.434.000,00	26.434.000,00	0,00
BELANJA	21.567.295.000,00	26.615.248.000,00	5.047.953.000,00	23,41
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.347.200.000,00	6.111.248.000,00	1.764.048.000,00	40,38
Belanja Pegawai	4.347.200.000,00	6.111.248.000,00	1.764.048.000,00	40,38
BELANJA LANGSUNG	17.220.095.000,00	20.504.000.000,00	3.283.905.000,00	19,07
Belanja Pegawai	17.220.095.000,00	20.504.000.000,00	3.283.905.000,00	19,07
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	13.545.000.000,00	13.545.000.000,00	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKURANG	13.545.000.000,00	13.545.000.000,00	0,00	0,00

8 September 2015
 Gubernur Papua
 LUKAS BEREND, S.P., M.P.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

Unitas Pemerintahan : 1. 20
 Organisasi : 1. 20. 18
 Unitas Kerja Organisasi : 1. 20. 18. 01
 Urusan Wajib Umum Daerah, Pemerintahan Umum, ARI, KMD, Perilaku Daerah, Keperawatan
 Badan Penyelenggaraan Samsara Daerah
 Badan Penyelenggaraan Samsara Daerah

KODE LURUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTYAKAP / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	0,00	31.178.888,00	31.178.888,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	33.118.800,00	33.118.800,00	0,00
1.1.1	Retribusi Perizinan Asli Daerah yang Sifat	0,00	33.118.800,00	33.118.800,00	0,00
	BELANJA	12.846.124.000,00	17.098.901.000,00	2.862.497.000,00	22,32
1.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.846.124.000,00	8.388.901.000,00	2.362.497.000,00	61,22
1.1.1	Belanja Pegawai	3.846.124.000,00	8.188.901.000,00	2.342.497.000,00	60,07
1.2	BELANJA LANGSUNG	9.000.000.000,00	9.289.000.000,00	4.989.000.000,00	55,32
1.2.1	Belanja Pegawai	1.744.430.000,00	1.287.100.000,00	(227.280.000,00)	(13,03)
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.091.000.000,00	6.999.400.000,00	628.400.000,00	10,32
1.2.3	Belanja Modal	1.164.570.000,00	1.241.500.000,00	1.528.499.999,99	131,25
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.846.124.000,00)	(17.098.901.000,00)	(2.862.497.000,00)	22,32
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKURANG	(12.846.124.000,00)	(17.098.901.000,00)	(2.862.497.000,00)	22,32

8 September 2013
 Gubernur Papua
 LUKEAS MAMUJI, S.P., MH.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

Unitas Pemerintahan : 1. 21
 Organisasi : 1. 21. 01
 Unitas Kerja Organisasi : 1. 21. 01. 01
 Urusan Wajib Pelayanan Pangan
 Badan Kelolaan Pangan dan Kesehatan Masyarakat
 Badan Kelolaan Pangan dan Kesehatan Masyarakat

KODE LURUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTYAKAP / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA	25.488.101.000,00	38.145.714.000,00	12.657.613.000,00	49,67
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.088.101.000,00	10.245.114.000,00	2.157.013.000,00	26,67
	Belanja Pegawai	8.088.101.000,00	10.245.114.000,00	2.157.013.000,00	26,67
	BELANJA LANGSUNG	17.400.000.000,00	27.900.600.000,00	10.500.600.000,00	60,35
	Belanja Pegawai	4.243.000.000,00	1.291.000.000,00	(2.952.000.000,00)	(69,57)
	Belanja Barang dan Jasa	13.157.000.000,00	26.609.600.000,00	13.457.600.000,00	102,28
	Belanja Modal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.488.101.000,00)	(38.145.714.000,00)	(12.657.613.000,00)	49,67
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKURANG	(25.488.101.000,00)	(38.145.714.000,00)	(12.657.613.000,00)	49,67

8 September 2013
 Gubernur Papua
 LUKEAS MAMUJI, S.P., MH.


Lampiran 1 Peraturan Daerah
Nomor 1 TAHUN 2015
Tanggal 6 September 2015

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1. 32
 Organisasi : 1. 32. 01
 Sub Unit Organisasi : 1. 32. 01. 01

Urusan Wajib Penerimaan Masyarakat dan Desa
 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

KODOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.772.187.000,00	27.362.780.000,00	1.590.593.000,00	6,15
1.1	Beban Pegawai	1.940.000.000,00	10.230.762.000,00	8.290.762.000,00	42,73
1.2	BELANJA LANGSUNG	13.832.018.000,00	17.132.018.000,00	3.300.000.000,00	23,85
2.1	Beban Pegawai	750.110.000,00	1.100.000.000,00	350.000.000,00	46,65
2.2	Beban Barang dan Jasa	14.081.908.000,00	15.520.000.000,00	1.438.092.000,00	10,21
2.3	Beban Modal	67.900.000,00	620.000,00	(67.280.000,00)	-99,16
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.772.187.000,00)	(17.562.780.000,00)	(4.790.593.000,00)	37,55
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(12.772.187.000,00)	(17.562.780.000,00)	(4.790.593.000,00)	37,55

WATARA, 6 September 2015
GUBERNUR PAPUA

SUGIYANTO, S.P., M.P.

Lampiran 1 Peraturan Daerah
Nomor 1 TAHUN 2015
Tanggal 6 September 2015

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1. 25
 Organisasi : 1. 25. 01
 Sub Unit Organisasi : 1. 25. 01. 01

Urusan Wajib Konsultasi dan Informasi
 Dinas Komunikasi dan Informatika
 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1	Hasil Retribusi Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.2		0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.3		0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	BELANJA	22.873.684.000,00	42.236.375.000,00	19.362.691.000,00	84,63
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.771.684.000,00	10.288.746.000,00	1.517.062.000,00	17,27
2.1.1	Beban Pegawai	8.771.684.000,00	10.288.746.000,00	1.517.062.000,00	17,27
2.2	BELANJA LANGSUNG	14.102.000.000,00	31.947.629.000,00	17.845.629.000,00	126,53
2.1	Beban Pegawai	1.714.000.000,00	1.420.755.000,00	(293.245.000,00)	-17,11
2.2	Beban Barang dan Jasa	12.388.000.000,00	30.526.874.000,00	18.138.874.000,00	146,37
2.3	Beban Modal	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.873.684.000,00)	(17.236.375.000,00)	(4.362.691.000,00)	33,87
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(12.873.684.000,00)	(17.236.375.000,00)	(4.362.691.000,00)	33,87

WATARA, 6 September 2015
GUBERNUR PAPUA

SUGIYANTO, S.P., M.P.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Uraian Permulaan : 1. 20. Uraian Waktu Peristiwa
 1. 20. 01. Saluran Perantara dan Ayo Daerah
 1. 20. 01. 01. Saluran Perantara dan Ayo Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
2	3	4	5	6
PENDAPTIAN	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
PENDAPTIAN ASLI DAERAH	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Tetap	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
BELANJA	21.551.666.000,00	25.521.400.000,00	4.969.734.000,00	23,06
BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.843.600.000,00	17.379.400.000,00	3.535.800.000,00	25,54
Belanja Pegawai	13.813.600.000,00	17.379.400.000,00	3.565.800.000,00	25,81
BELANJA LANGSUNG	7.742.000.000,00	8.242.000.000,00	500.000.000,00	6,46
Belanja Pegawai	1.879.301.000,00	2.343.301.000,00	464.000.000,00	24,70
Belanja Barang dan Jasa	5.862.700.000,00	5.908.700.000,00	46.000.000,00	0,78
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(21.551.666.000,00)	(25.521.400.000,00)	(4.969.734.000,00)	23,06
SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKERAJAAN	(21.551.666.000,00)	(25.521.400.000,00)	(4.969.734.000,00)	23,06

Jakarta, 8 September 2015
 GOVERNOR PAPUA


PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Uraian Permulaan : 1. 01. Uraian Waktu Peristiwa
 1. 01. 01. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
 1. 01. 01. 01. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
2	3	4	5	6
PENDAPTIAN	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00
PENDAPTIAN ASLI DAERAH	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00
Pajak Retribusi Daerah	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00
BELANJA	91.409.016.000,00	106.449.113.000,00	15.040.097.000,00	16,56
BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.306.718.000,00	18.016.833.000,00	6.710.115.000,00	59,33
Belanja Pegawai	11.306.718.000,00	18.016.833.000,00	6.710.115.000,00	59,33
BELANJA LANGSUNG	80.102.300.000,00	88.432.280.000,00	8.329.980.000,00	10,40
Belanja Pegawai	4.702.175.000,00	9.700.875.000,00	5.000.000.000,00	106,56
Belanja Barang dan Jasa	42.847.185.000,00	42.742.281.000,00	(104.904.000,00)	-0,24
Belanja Modal	32.553.000.000,00	36.000.000.000,00	3.447.000.000,00	10,44
SURPLUS / (DEFISIT)	(91.409.016.000,00)	(106.449.113.000,00)	(15.040.097.000,00)	16,56
SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKERAJAAN	(91.409.016.000,00)	(106.449.113.000,00)	(15.040.097.000,00)	16,56

Jakarta, 8 September 2015
 GOVERNOR PAPUA


PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Pemerintahan : 2, 01
 Unit Pelaksana : 2, 01, 02
 Unit Organisasi : 2, 01, 03, 04
 Urusan Penerimaan :
 Dinas Perkebunan
 Dinas Perkebunan

KODE UNIT	URUSAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Hati Belibud Daerah	220.000.000,00	214.843.790,00	(5.156.210,00)	-2,35
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	220.000.000,00	217.000.000,00	(3.000.000,00)	-1,36
		0,00	67.843.790,00	67.843.790,00	3,20
	BELANJA	44.031.320.000,00	47.432.730.000,00	3.401.410.000,00	7,73
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.750.470.000,00	12.061.237.000,00	2.310.767.000,00	23,70
	Belanja Pegawai	9.750.470.000,00	12.061.237.000,00	2.310.767.000,00	23,70
	BELANJA LANGSUNG	34.280.850.000,00	35.371.493.000,00	1.090.643.000,00	3,18
	Belanja Pegawai	1.726.200.000,00	1.730.000.000,00	3.800.000,00	0,22
	Belanja Barang dan Jasa	25.717.500.000,00	26.215.000.000,00	497.500.000,00	1,93
	Belanja Modal	7.407.150.000,00	7.431.493.000,00	24.343.000,00	0,33
	SURPLUS / (DEFISIT)	(44.381.320.000,00)	(47.217.437.000,00)	(2.836.117.000,00)	6,39
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERAKHIR	(44.381.320.000,00)	(47.217.437.000,00)	(2.836.117.000,00)	6,39

Yogyakarta, 8 September 2015
 GUBERNUR PAPUA

 (SALINAN) (MATERI) (S. 27, 28)

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Pemerintahan : 2, 04
 Unit Pelaksana : 2, 04, 03
 Unit Organisasi : 2, 04, 03, 20
 Urusan Penerimaan :
 Dinas Perikanan dan Kelautan
 Dinas Perikanan dan Kelautan

KODE UNIT	URUSAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Hati Belibud Daerah	128.000.000,00	129.000.000,00	1.000.000,00	0,78
		128.000.000,00	129.000.000,00	1.000.000,00	0,78
	BELANJA	21.074.252.000,00	20.279.210.000,00	(795.042.000,00)	-3,77
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.704.252.000,00	11.230.710.000,00	4.526.458.000,00	67,52
	Belanja Pegawai	6.704.252.000,00	11.230.710.000,00	4.526.458.000,00	67,52
	BELANJA LANGSUNG	14.370.000.000,00	9.048.500.000,00	(5.321.500.000,00)	-37,09
	Belanja Pegawai	941.200.000,00	841.200.000,00	(100.000.000,00)	-10,63
	Belanja Barang dan Jasa	17.222.200.000,00	17.222.200.000,00	0,00	0,00
	Belanja Modal	6.906.600.000,00	6.906.600.000,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.356.252.000,00)	(26.287.437.000,00)	(4.931.185.000,00)	23,14
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERAKHIR	(21.356.252.000,00)	(26.287.437.000,00)	(4.931.185.000,00)	23,14

Yogyakarta, 8 September 2015
 GUBERNUR PAPUA

 (SALINAN) (MATERI) (S. 27, 28)

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

Uraian Persepsi/kegiatan : 1. 01 Urusan Pemerintahan
 : 2. 02. 01 Urusan Pilihan Kabupaten
 : 2. 02. 01. 01 Dinas Kabupaten
 : 2. 02. 01. 01. 01 Dinas Kabupaten

KETERANGAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTARIFAN / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5	6
PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA		46.741.236.000,00	51.267.096.000,00	5.525.860.000,00	11,83
BELANJA TIDAK LANGSUNG		21.341.000.000,00	25.921.000.000,00	4.580.000.000,00	21,49
	Belanja Pegawai	21.341.000.000,00	25.921.000.000,00	4.580.000.000,00	21,49
BELANJA LANGSUNG		24.399.236.000,00	25.346.096.000,00	966.896.000,00	3,96
	Belanja Pegawai	2.996.725.000,00	4.081.275.000,00	1.084.550.000,00	3,61
	Belanja Barang dan Jasa	18.494.511.000,00	19.759.875.000,00	1.265.364.000,00	6,84
	Belanja Modal	1.873.275.000,00	1.504.946.000,00	(368.329.000,00)	(19,65)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(46.741.236.000,00)	(51.267.096.000,00)	(4.525.860.000,00)	9,70
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENDARA	(46.741.236.000,00)	(51.267.096.000,00)	(4.525.860.000,00)	9,70

8 September 2013
 GOVERNOR PAPUA

 LUKAS ERISMIS, S.P., M.H.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

Uraian Persepsi/kegiatan : 2. 03 Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral
 : 3. 03. 03 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 : 3. 03. 03. 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

KETERANGAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTARIFAN / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5	6
PENDAPATAN		0,00	1.867.900.000,00	1.867.900.000,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH		0,00	1.867.900.000,00	1.867.900.000,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	1.867.900.000,00	1.867.900.000,00	0,00
BELANJA		68.677.736.000,00	71.313.141.000,00	2.635.405.000,00	3,84
BELANJA TIDAK LANGSUNG		12.107.515.000,00	13.066.528.000,00	959.013.000,00	7,92
	Belanja Pegawai	12.107.515.000,00	13.066.528.000,00	959.013.000,00	7,92
BELANJA LANGSUNG		56.570.221.000,00	58.246.613.000,00	1.676.392.000,00	2,96
	Belanja Pegawai	1.744.100.000,00	1.882.500.000,00	138.400.000,00	7,92
	Belanja Barang dan Jasa	38.486.446.000,00	41.284.646.000,00	2.798.200.000,00	7,29
	Belanja Modal	16.339.675.000,00	15.079.467.000,00	(1.260.208.000,00)	(7,71)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(68.677.736.000,00)	(71.313.141.000,00)	(2.635.405.000,00)	3,84
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENDARA	(68.677.736.000,00)	(71.313.141.000,00)	(2.635.405.000,00)	3,84

8 September 2013
 GOVERNOR PAPUA

 LUKAS ERISMIS, S.P., M.H.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

Unit Penyelenggaraan : 2. 04
 Organisasi : 2. 04. 01
 Unit Organisasi : 2. 04. 01. 01

Unit Pelaksana Teknis : 01
 Dinas Perikanan dan Kelautan
 Dinas Perikanan dan Kelautan

KODE UNIT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	146.580.000,00	146.580.000,00	0,00	0,00
	Hasil Retribusi Daerah	146.580.000,00	146.580.000,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	BELANJA	76.265.779.528,00	76.265.779.528,00	0,00	0,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.836.883.300,00	13.472.899.000,00	(1.363.984.300,00)	(9,19)
	Belanja Pegawai	14.836.883.300,00	13.472.899.000,00	(1.363.984.300,00)	(9,19)
	BELANJA LANGSUNG	61.428.896.228,00	62.792.880.528,00	1.363.984.300,00	2,22
	Belanja Pegawai	47.890.000,00	46.340.000,00	(1.550.000,00)	(3,24)
	Belanja Barang dan Jasa	8.868.756.528,00	13.228.261.528,00	4.359.505.000,00	49,14
	Belanja Modal	64.740.000,00	1.224.619.000,00	1.159.879.000,00	18,05
	SURPLUS / (DEFISIT)	(61.685.779.528,00)	(62.800.199.528,00)	(1.114.420.000,00)	1,81
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKEMBAH	(61.685.779.528,00)	(62.800.199.528,00)	(1.114.420.000,00)	1,81

8 September 2012
 Gubernur Papua
 LUUK MEINKE, S.P., M.P.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2013

Unit Penyelenggaraan : 2. 01
 Organisasi : 2. 01. 01
 Unit Organisasi : 2. 01. 01. 01

Unit Pelaksana Teknis : 01
 Dinas Kelautan dan Perikanan
 Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE UNIT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.940.000.000,00	3.802.000.000,00	862.000.000,00	29,32
	Hasil Retribusi Daerah	2.940.000.000,00	3.802.000.000,00	862.000.000,00	29,32
	BELANJA	55.791.053.000,00	57.216.736.000,00	1.425.683.000,00	2,54
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.299.408.000,00	12.823.211.000,00	(476.197.000,00)	(3,58)
	Belanja Pegawai	13.299.408.000,00	12.823.211.000,00	(476.197.000,00)	(3,58)
	BELANJA LANGSUNG	42.491.645.000,00	44.393.525.000,00	1.901.880.000,00	4,48
	Belanja Pegawai	1.855.500.000,00	1.855.500.000,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	21.270.000.000,00	23.170.000.000,00	1.900.000.000,00	8,93
	Belanja Modal	19.366.145.000,00	20.368.025.000,00	1.001.880.000,00	5,17
	SURPLUS / (DEFISIT)	(52.851.053.000,00)	(53.414.736.000,00)	(563.683.000,00)	1,05
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKEMBAH	(52.851.053.000,00)	(53.414.736.000,00)	(563.683.000,00)	1,05

8 September 2012
 Gubernur Papua
 LUUK MEINKE, S.P., M.P.

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Kelembagaan : 2. 06. Urusan Pemerintahan
 : 2. 06. 01. Dinas Perkebunan dan Perdagangan
 : 2. 06. 01. 01. Dinas Perkebunan dan Perdagangan

URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
	2	3	4	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Hati Belukau Daerah	70.000.000,00	123.672.500,00	53.672.500,00	76,48
	70.000.000,00	123.672.500,00	53.672.500,00	76,48
BELANJA	29.922.211.000,00	33.263.090.000,00	3.340.879.000,00	11,19
BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.146.221.000,00	12.746.570.000,00	2.600.349.000,00	25,63
Belanja Pegawai	10.146.221.000,00	12.746.570.000,00	2.600.349.000,00	25,63
BELANJA LANGSUNG	19.776.000.000,00	20.516.520.000,00	740.520.000,00	3,75
Belanja Pegawai	1.441.215.000,00	1.442.225.000,00	1.000.000,00	0,07
Belanja Barang dan Jasa	13.075.950.000,00	13.227.952.000,00	152.002.000,00	1,16
Belanja Modal	5.258.845.000,00	5.772.343.000,00	513.498.000,00	9,75
SURPLUS / (DEFISIT)	(29.822.211.000,00)	(23.170.417.500,00)	(6.653.996.000,00)	22,32
SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(29.822.211.000,00)	(23.170.417.500,00)	(6.653.996.000,00)	22,32

8 September 2015
 WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI PAPUA


PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Kelembagaan : 2. 06. Urusan Pemerintahan
 : 2. 06. 01. Dinas Perkebunan dan Perdagangan
 : 2. 06. 01. 01. Dinas Perkebunan dan Perdagangan

URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG)	
	2	3	4	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Hati Belukau Daerah	70.000.000,00	123.672.500,00	53.672.500,00	76,48
	70.000.000,00	123.672.500,00	53.672.500,00	76,48
BELANJA	29.922.211.000,00	33.263.090.000,00	3.340.879.000,00	11,19
BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.146.221.000,00	12.746.570.000,00	2.600.349.000,00	25,63
Belanja Pegawai	10.146.221.000,00	12.746.570.000,00	2.600.349.000,00	25,63
BELANJA LANGSUNG	19.776.000.000,00	20.516.520.000,00	740.520.000,00	3,75
Belanja Pegawai	1.441.215.000,00	1.442.225.000,00	1.000.000,00	0,07
Belanja Barang dan Jasa	13.075.950.000,00	13.227.952.000,00	152.002.000,00	1,16
Belanja Modal	5.258.845.000,00	5.772.343.000,00	513.498.000,00	9,75
SURPLUS / (DEFISIT)	(29.822.211.000,00)	(23.170.417.500,00)	(6.653.996.000,00)	22,32
SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(29.822.211.000,00)	(23.170.417.500,00)	(6.653.996.000,00)	22,32

8 September 2015
 WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI PAPUA
